

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya air merupakan isu yang menjadi perhatian di era modern ini, terutama di negara berkembang seperti Indonesia (Damayanti & Sisdiyanto, 2025). Air merupakan salah satu sumber daya yang memiliki peran penting bagi kehidupan manusia di berbagai sektor, seperti industri, rumah tangga, perkotaan, irigasi, perikanan, dan peternakan (Ray & Wijayana, 2021). Hal ini terbukti dari data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, kebutuhan air tahunan di sektor tersebut yang diperkirakan terus mengalami peningkatan mencapai 31% hingga tahun 2045. Namun, bertolak belakang dengan ketersediaan air bersih yang mengalami penurunan akibat pertumbuhan penduduk dan industri yang semakin meningkat (Aruan, 2020). Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat pada tahun 2025 sebanyak 96% air di Indonesia telah tercemar oleh limbah rumah tangga dan industri. Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, peran lembaga penyedia air bersih menjadi semakin penting, salah satunya adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Zahra & Kurniawan, 2024).

PDAM merupakan perusahaan daerah yang bertanggung jawab untuk menyediakan air bersih kepada masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 total volume air bersih yang disalurkan oleh PDAM di Indonesia telah mencapai 4,37 miliar m³. Data tersebut menunjukkan bahwa peran PDAM cukup signifikan dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Namun, pencemaran air masih menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh PDAM di Indonesia. Sebagai contoh, PDAM Tirta Barito dan Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh menghadapi permasalahan pencemaran air yang berdampak pada perubahan kualitas air menjadi keruh dan berbau (Raudah et al., 2025). Hal ini menegaskan perlunya pengelolaan lingkungan yang lebih baik oleh PDAM untuk menjaga kualitas air. Oleh sebab itu, konsep *green accounting* muncul sebagai alat penting yang dapat membantu perusahaan atau

instansi dalam mengelola dampak lingkungan dari aktivitas operasional mereka, termasuk dalam pengelolaan sumber daya air (Tania et al., 2024).

Konsep *green accounting* merupakan cabang dari akuntansi yang berfokus pada pengukuran dan pelaporan dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan (Hidayat & Sisdiyanto, 2025). Khususnya pada perusahaan penyedia air seperti PDAM, penerapan konsep ini menjadi penting karena dengan mengukur dan melaporkan biaya lingkungan, perusahaan dapat mengidentifikasi biaya yang timbul dari pengolahan air, pengelolaan limbah, serta upaya konservasi sumber daya air (Ray & Wijayana, 2021). Hal ini menjadikan PDAM tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, tetapi juga bertanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan. Namun dalam praktiknya, penerapan *green accounting* untuk keberlanjutan lingkungan ini masih menjadi tantangan bagi perusahaan di Indonesia, termasuk PDAM (Darno & Cahyani, 2022). Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya pemahaman mengenai pentingnya *green accounting* di kalangan manajemen (Penatari et al., 2023). Banyak manajer yang masih menganggap bahwa fokus utama mereka adalah pada aspek finansial jangka pendek, sehingga mengabaikan dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya.

Sehubungan dengan tantangan di atas, PDAM Bantul akan menjadi fokus objek dalam penelitian ini, beralamat di Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo No. 83 Karanggayam Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdiri sejak tahun 1992 sampai dengan 2025, PDAM Bantul telah menyalurkan air bersih sebanyak 4,5 juta m³. Sebagai perusahaan penyedia air bersih, PDAM Bantul juga menghadapi permasalahan dalam penerapan *green accounting*. Berdasarkan observasi awal, PDAM ini terdapat Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang menghasilkan limbah lumpur endapan dari proses sedimentasi dan filtrasi. Meskipun limbah tersebut sudah dicatat oleh perusahaan sebagai biaya lingkungan, namun belum ada penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya secara khusus. Melihat fenomena tersebut peneliti akan mengevaluasi sejauh mana perusahaan mampu menerapkan *green accounting*.

Dewasa ini, penerapan *green accounting* di Indonesia masih bersifat sukarela dan belum diatur secara khusus dalam standar akuntansi yang dijadikan acuan untuk mengevaluasi perusahaan (Kartika & Sisdiyanto, 2025). Namun, mengingat pentingnya *green accounting* dalam perannya membantu perusahaan memahami dan mengelola risiko lingkungan, sekaligus membuka peluang untuk mencapai efisiensi operasional (Putra & Sisdiyanto, 2024). Evaluasi penerapan *green accounting* ini dapat mengacu ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2015 paragraf 14 (empat belas) yang menyatakan bahwa entitas dapat menyajikan biaya lingkungan secara terpisah dari laporan keuangan. Adapun tahapan dari pengalokasian biaya lingkungan menurut PSAK No. 1 Tahun 2015 meliputi identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan (Te & Aurelia, 2024).

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Damayanti & Sisdiyanto (2025) menjelaskan bahwa di PDAM Jakarta telah menerapkan tahapan alokasi biaya lingkungan dalam operasional, termasuk identifikasi biaya terkait pengelolaan air dan limbah, namun belum menerapkan *green accounting* secara menyeluruh, khususnya dalam penyajian biaya lingkungan yang terintegrasi dalam laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan temuan Pryatna et al., (2023) yang menunjukkan bahwa PAM Tirta Karajae Kota Parepare sudah cukup baik dalam menerapkan *green accounting*, karena sudah berusaha untuk memastikan bahwa tidak ada limbah yang membahayakan lingkungan sekitar kegiatan operasional perusahaan, akan tetapi belum menyajikan biaya lingkungannya. Sementara itu, temuan Nurfadila (2019) menyebutkan bahwa biaya pengelolaan lingkungan yang dikeluarkan oleh PDAM Kota Makassar dilaporkan pada catatan atas laporan keuangan sebagai biaya yang masih harus dibayar dan beban langsung usaha.

Penelitian lainnya, seperti oleh Norsita (2021) menemukan bahwa perusahaan telah menerapkan tahapan alokasi biaya lingkungan limbah cair, namun belum secara khusus mengukur dan menyajikan biaya-biaya yang terjadi dalam proses pengolahan limbah cair ke dalam laporan biaya lingkungan. Selanjutnya Kurnia & Zulhelmi (2024) menemukan bahwa perusahaan dalam

mengalokasikan biaya lingkungan di beberapa tahapan antara lain identifikasi, pengakuan, dan pengukuran, namun tidak memenuhi ketentuan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Penelitian oleh Rospani & Handajani (2024) menemukan bahwa RSUD Kota Mataram telah mengeluarkan biaya lingkungan dan telah menerapkan *green accounting* mulai dari bagian mengidentifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan belum sepenuhnya menerapkan konsep *green accounting*. Hal ini menegaskan perlunya pemahaman tentang pentingnya penerapan konsep tersebut dalam perusahaan. Teori legitimasi relevan dalam konteks ini, yang menyatakan bahwa strategi perusahaan harus memastikan kegiatan operasionalnya tetap sesuai dengan standar dan nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan tempat perusahaan beroperasi, sehingga dapat diterima oleh publik (Rohim & Hardiningsih, 2022). Menurut Rospani & Handajani (2024) teori ini sesuai dengan *green accounting* karena kemampuan PDAM dalam mengelola limbahnya secara efektif tentunya akan berdampak pada keberlanjutan operasionalnya untuk bertahan dalam jangka panjang.

Hal ini menjadi krusial, mengingat bahwa masih banyak perusahaan yang menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan praktik akuntansi yang ramah lingkungan secara efektif (Aristiyanti & Sisdianto, 2024). Maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan *green accounting* untuk mengetahui kesesuaian penerapan konsep tersebut yang diterapkan oleh PDAM Bantul dengan tahapan alokasi biaya lingkungan berdasarkan PSAK No. 1 Tahun 2015. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada penerapan *green accounting* pada PDAM Bantul. Berdasarkan uraian tersebut peneliti akan menggunakan judul penelitian: “Analisis Penerapan *Green Accounting* Untuk Pengelolaan Sumber Daya Air (Studi Kasus Pada PDAM Bantul)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan *green accounting* pada PDAM Bantul?

2. Bagaimana perbandingan penerapan *green accounting* pada PDAM Bantul berdasarkan PSAK No. 1 Tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis penerapan *green accounting* pada PDAM Bantul.
2. Mengetahui perbandingan penerapan *green accounting* pada PDAM Bantul berdasarkan PSAK No. 1 Tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi literatur mengenai penerapan *green accounting*, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya air pada perusahaan daerah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji aspek lingkungan dalam akuntansi, baik di perusahaan air minum maupun di sektor lainnya.

2. Secara Praktis

Memberikan rekomendasi bagi perusahaan tentang bagaimana *green accounting* dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya air serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas. Selain itu, memberi informasi tentang pengelolaan sumber daya air oleh perusahaan guna meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam program lingkungan.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian hanya berfokus pada analisis penerapan *green accounting* untuk pengelolaan sumber daya air PDAM Bantul berdasarkan PSAK No. 1 Tahun 2015. Tahapan penerapan *green accounting* terdiri dari beberapa tahapan, yaitu identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.